

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Kabupaten Klaten, Jawa tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan di ketiga desa tersebut. Data diperoleh melalui metode wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap empat informan yang mewakili ketiga desa penelitian, dan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan MSD, bahwa program pemerintah desa Ponggok sudah diketahui masyarakat setempat. Informan MSN juga menyatakan bahwa pemerintah desa Kalangan sudah menyelenggarakan beberapa program yang diperuntukkan bagi masyarakat desa. Hal demikian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah menggunakan dana desa yang diterimanya untuk menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program tersebut juga sudah diketahui dan diikuti oleh masyarakat desa. Hasil penelitian juga mengungkapkan bentuk-bentuk program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dengan dana desa yang diperoleh, sosialisasi yang dilakukan untuk menarik partisipasi

masyarakat yang menjadi sasaran atau target utama kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dari kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

#### **4.1.1 Prioritas Pengalokasian Dana Desa**

Dana desa sebagai salah satu bentuk pendapatan desa yang diterima dari pemerintah pusat. Dana desa ini dialokasikan untuk membantu pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaannya pun juga diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak untuk segera diatasi.

Hal demikian sesuai dengan kutipan wawancara dengan informan KDP berikut.

“Tujuan dan desa sendiri kan jelaskan, dimana ada mawacipta dari pak Jokowi pada aliena 3 dimana membangun pinggiran itu harapannya desa-desa ini semua berkembang, menggali potensi, mengurangi kemiskinan, mengangkat ekonomi desa, memberdayakan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Dana desa yang diberikan kemudian dialokasikan untuk kegiatan prioritas seperti yang disampaikan oleh Presiden RI untuk membangun desa pinggiran, termasuk Desa Ponggok. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa tentunya ditujukan untuk mengembangkan desa dengan cara menggali potensi yang ada, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan maupun

kepada ibu-ibu rumah tangga yang memerlukan pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga maupun sekedar mengisi waktu luang.

Menurut Informan BPD, prioritas kegiatan ini dinilai dari berbagai usulan masyarakat kepada pemerintah desa. Berikut kutipan wawancaranya.

“Koordinasi program desa yang ditawarkan masyarakat ditampung. Pemerintah desa memilah keinginan masyarakat sesuai skala prioritas dimana harus mengacu anggaran. Usulannya adalah sarpras kegiatan wisata besuki dan sekitarnya, infrastuktur kawasan wisata, peningkatan varian produk berbahan Nila.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Ponggok)

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ide kegiatan yang dapat diselenggarakan pemerintah dapat berasal dari masyarakat. Hal demikian dikarenakan masyarakat desa yang lebih memahami kondisi desa dan mengetahui apa yang paling dibutuhkan. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah desa memilih kegiatan mana yang dinilai menjadi prioritas dan harus segera dilaksanakan. Usulan yang paling banyak diajukan masyarakat adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk memajukan wisata Besuki, serta peningkatan varian produk berbahan dasar nila, karena desa Ponggok membudidayakan ikan nila.

Lebih lanjut, Informan BPD mengungkapkan proses penggalian aspirasi masyarakat dalam merumuskan kegiatan penggunaan dana desa. Berikut kutipan wawancaranya.

“Kalau kami dari BPD, tidak lepas dari aspirasi masyarakat karena tugas kami adalah merangkum nampung segala aspirasi masyarakat, bagaimana agar kebijakan dalam plot anggaran yang bersumber dari manapun agar sesuai dengan sasaran. Keinginan masyarakat ini kan bagian tugas dari BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Yang pertama BPD juga proaktif mendatangi suatu wilayah. Di desa Ponggokan ada 6 RW/4 RT tentunya kami akan mendatangi ditiap

perkumpulan ditiap wilayah. BPD akan menyampaikan tentang program desa dan akan juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang akan nanti menentukan arah rencana kerja dan mengarah di desa. Kemudian disesuaikan dengan program desa karena menyangkut anggaran dan sesuai dengan visi-misi. Semua plot anggaran diputuskan dengan musyawarah desa.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Ponggok)

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa BPD menampung berbagai aspirasi masyarakat. Berdasarkan aspirasi tersebut BPD memilahnya dan disesuaikan dengan sasaran dan anggaran dana desa yang diberikan. Selain itu, BPD juga mendatangi wilayah yang diajukan dalam aspirasi masyarakat tersebut untuk mengecek kondisinya secara langsung, serta untuk menentukan apakah wilayah tersebut dapat menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan dana desa. Setelah melakukan analisis terhadap ide mana yang dirasa perlu dan menjadi prioritas perbaikan maupun pengembangan, serta memastikan bahwa wilayah tersebut benar-benar membutuhkan aliran dana desa, selanjutan BPD menyusun program desa dan menyampaikannya pada masyarakat desa sehingga dapat diputuskan secara musyawarah program-program.

Banyaknya jumlah desa di Klaten membuat Pemerintah Desa perlu menganalisis terlebih dahulu untuk menentukan program prioritas diberikan pada daerah mana. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan KDP berikut.

“Pada Desa Ponggok ini, kita membangun desa berdasar data. Dulu tahun 2007 daerah yang miskin dimana belum optimal dalam pembangunan desa, makanya dengan adanya pembangunan desa ini, kami mulai fokus dimana sih yang kurang di Desa Ponggok khusus untuk pemerataan pembangunan, mensejahterakan desa ponggok, fokuskan pada data. Visi misi ponggok inikan menjadikan ponggok menjadi desa

wisata yang mandiri, yang mampu mengembangkan potensi desa serta adil berbudaya dan maju terhadap lingkungan ini adalah komitmen kami dan masyarakat desa dimana kami berusaha untuk memeriahkan masyarakat desa dalam kami berusaha untuk meriahkan masyarakat..” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Penentuan skala prioritas oleh pemerintah desa dilakukan berdasarkan data yang ada. Oleh karena itu, pemerintah desa harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kekurangan desa dan perlu segera diperbaiki, sehingga dapat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Seperti Desa Ponggok yang pada tahun 2007 masih termasuk dalam desa miskin dan memerlukan pembangunan. Kemudian pemerintah desa melakukan evaluasi dan mencari bagian mana yang harus diprioritaskan untuk dibangun dan dapat memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan yang direncanakan juga disesuaikan dengan visi dan misi desa, yaitu untuk menjadikan Desa Ponggok sebagai Desa wisata yang adil berbudaya serta maju namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Kegiatan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan dana desa pun juga harus mengikutsertakan masyarakat sekitar, agar pengembangan desa dapat berjalan secara berkesinambungan, serta sesuai dengan yang dibutuhkan desa dan masyarakatnya.

Hal serupa disampaikan oleh informan KRW yang menyatakan bahwa prioritas pemanfaatan dana desa dilakukan dengan mengutamakan penciptaan produk unggulan daerah. Berikut kutipan wawancaranya.

“Secara data base kita memang harus *one village one product*, produk unggulan desa, bisa membuat brand desa memberdayakan masyarakat.”  
(Hasil wawancara dengan informan KRW – Desa Ponggok)

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan keunggulan desa. Salah satunya adalah dengan membuat produk yang menggunakan sumber daya desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, yaitu masyarakat sekitar. Memanfaatkan sumber daya alam desa juga sebagai salah satu membuat produk yang berbeda dengan produk desa lain, karena bahan-bahan yang digunakan merupakan ciri khas dari desa yang bersangkutan, sehingga produk tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai *brand* dengan ciri khas desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Ponggok menggunakan dana desa dengan menyelenggarakan program atau kegiatan yang menjadi prioritas desa. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengembangkan desa dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa serta memberdayakan masyarakat desa, harapannya adalah agar desa memiliki produk yang unggul dan berbeda dari desa lain.

Pada Desa Kalangan, prioritas kegiatan ini dapat ditentukan dengan menyebarkan formulir ke perangkat RT maupun RW. Berikut kutipan wawancara dengan BPD Desa Kalangan.

“Kalo dana desa biasanya menyebarkan formulir ke RT/RW untuk mengumpulkan warga. Nanti dimusyawarahkan dan aspirasi tersebut kemudian diantar ke desa. Nanti ditim TPK yang survey kelapangan

untuk nyusun RAB. Nanti dibagi sesuai dengan kebutuhan.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Kalangan)

Penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui penyebaran formulir pada perangkat RT dan RW. BPD berharap masyarakat dapat memusyawarahkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang diperlukan masyarakat untuk memajukan desanya. Kegiatan yang sudah dimusyawarahkan dan ditulis dalam formulir tersebut, kemudian disampaikan ke pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Pihak BPD kemudian membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melakukan survei awal guna mengetahui kondisi di lapangan dan kesesuaian kegiatan yang diajukan dengan kondisi desa. Setelah melakukan survei, kemudian TPK menentukan prioritas kegiatan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang nantinya dibagikan sesuai dengan kebutuhan tiap kegiatan yang diselenggarakan.

Menurut Informan MSK, kegiatan dengan penggunaan dana desa yang menjadi prioritas di Desa Kalangan yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan. Pembangunan fisik dilakukan untuk membangun infrastruktur desa menjadi lebih baik dan nyaman untuk dikunjungi. Sedangkan kegiatan pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, sehingga dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya yang ada, serta dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pada Desa Tegalorejo, menurut Informan KDTR, kegiatan penggunaan dana desa dilakukan dengan menggali aspirasi dari masyarakat. Setelah

aspirasi masyarakat terkait kegiatan menggunakan dana desa yang hendak diselenggarakan ditampung, kemudian dilakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa lokasi atau masyarakat tersebut memerlukan kegiatan tersebut. Selanjutnya dilakukan pertemuan RT- RW untuk menyampaikan bentuk kegiatan yang disetujui, dan berkoordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan. Informan BPD menyebutkan bahwa kegiatan yang menjadi prioritas di Desa Tegalrejo yaitu pembangunan fisik jalan dan infrastruktur.

#### **4.1.2 Perencanaan Kegiatan**

Setelah dilakukan menentukan kegiatan mana saja yang akan diselenggarakan dengan menggunakan dana desa, selanjutnya dilakukan perencanaan kegiatannya. Informan BPD Desa Ponggok menjelaskan proses perencanaan kegiatan tersebut sebagai berikut.

“Pertama mengacu pada manajer desa yang tertuang RPJdesnya desa. RPJdesa adalah suatu rencana kerja yang 6 tahun kemudian diselaraskan RKPdesnya desa karena mengacu anggaran dan diperjelaskan di RAPdesa disahkan RPJdesnya desa jadi ketika ada penyusunan rencana terkait dengan anggaran yang sudah serap aspirasi dan kajian berdasarkan data yakni profil dan monografi desa dimana memuat berbagai hal di desa, umur, jumlah, pendudukan, jenis kelamun, jumlah pra sejahtera atau mungkin juga akses desa. Suatu gambaran nanti arahnya dan anggaran desa dan juga luasan wilayah desa ponggok seberapa besar pemukiman, dari ke 4 dukuh, yakni Ponggok, Jemblongan, Keringan, Unggul Sari.

Nah setelah itu lahan pertanian, ada pertanian primer dan sekunder. Gimana strategi dengan tadah hujan agar bisa produksi. Alternatifnya pemerintah mencari sumber air agar pola taneman tidak terganggu. Kami melakukan pengeboran antara 40-50 m itu sudah ada air. Nah itu alternatif yang dilakukan untuk mengatasi tadah hujan.

Masalah keluarga pra sejahterah juga. Miskinnya Keluarga diponggok mungkin beda dengan miskinnya desa lain. Maka peran serta mengatasinya adalah dengan mencari masalah apakah karena ketenaga kerja, atau latar belakang pendidikan. Makanya tugas pemerintah desa dan kelembagaan adalah bagaimana desa ponggok memiliki lembaga yang mewadahi segala bentuk inovasi yang akan dilaksanakan



warganya.” (Hasil wawancara dengan informan KRW – Desa Ponggok)

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan kegiatan desa disusun dalam bentuk RPJ. Rencana yang disusun juga mencantumkan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya serta sasaran yang dituju, seperti umur, jumlah dan jenis kelamin penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat serta wilayah, karena besarnya anggaran juga bergantung pada jenis kegiatan, serta sasaran yang dituju.

Selain itu, terkait dengan pertanian di desa, BPD melakukan analisis terhadap kondisi lokasi pertanian. Lahan pertanian yang belum memiliki sarana tadah hujan maupun sumber pengairan lain, kemudian dicarikan alternatif pengairan lain yang sesuai dengan lokasi pertanian. Misal pada Desa Ponggok, pemerintah desa dan BPD menyediakan alternatif sumber pengairan untuk lahan pertanian dengan melakukan pengeboran sekitar 40-50 meter.

Terkait dengan keluarga pra sejahtera, penanganan juga memperhatikan tingkat kesejahteraan di tiap desa, karena tiap desa memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dan BPD sangat penting untuk mencari permasalahan yang dialami hingga mengalami kemiskinan, baik dari ketenagakerjaan, maupun latar belakang pendidikan yang dimiliki. Pemerintah desa dan BPD juga menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam berinovasi menciptakan produk baru yang dapat membantunya dalam meningkatkan penghasilannya.

Pada Desa Kalangan, perencanaan kegiatan penggunaan dana desa dijelaskan sesuai kutipan wawancara berikut.

“Mungkin dah dijelaskan, aspirasi diserap terus TPK terjun ke lapangan untuk liat berapa surveynya habis berapa terus dihitung dan lokasinya dimana kemudian dimusyawarahkan.” (Hasil wawancara dengan informan MSN – Desa Kalangan)

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa proses perencanaan kegiatan penggunaan dana desa pertama kali dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat desa untuk mengumpulkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dan desa. Setelah ditentukan kegiatan yang hendak diselenggarakan, selanjutnya menunjuk TPK untuk memastikan kegiatan tersebut memang dibutuhkan dan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan dalam RAB, dan kemudian dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait.

“Kebanyakan fisik, seperti drainasi, badan jalan kalo pelatihan tingkat desa seperti pelatihan pembuatan drainase, terus pelatihan penanaman bunga sama SSB dinaungi karangtaruna.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Kalangan)

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang banyak diusulkan oleh masyarakat yaitu terkait dengan perbaikan fisik. Perbaikan fisik yang diusulkan merupakan pengadaan dan pembenahan infrastruktur desa, seperti perbaikan drainase. Kegiatan tersebut juga melatih masyarakat untuk membuat sendiri drainase agar ke depannya masyarakat dapat membuatnya sendiri tanpa perlu menunggu pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan yang diajukan juga berupa penanaman bunga yang dinaungi oleh karangtaruna, sehingga kegiatan ini juga sekaligus memberdayakan karangtaruna di desa.

### **4.1.3 Bentuk Kegiatan**

Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan dan mensejahterakan masyarakat desa dilakukan pemerintah desa dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan berupa peralatan. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara dengan informan KDP berikut.

“Pada tahun 2015 kita memberikan bantuan peralatan bagaimana menemukan produk unggulan desa produk makanan olahan nilai kalo ke tempat wisata nanti dapat bingkisan produk dari PKK. Termasuk juga untuk lingkungan dalam wisata perbulan 20 rb – 30 rb wisatawan perbulan.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Berdasarkan uraian tersebut, bantuan berupa peralatan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam menemukan sumber daya yang tepat untuk membuat produk unggulan, seperti makanan olahan khas desa maupun buah tangan untuk oleh-oleh wisatawan yang berkunjung. Selain itu, peralatan yang diberikan juga digunakan untuk membantu memudahkan masyarakat desa dalam proses produksi produk olahan makanan maupun produk lain yang dinilai berharga. Dana desa juga diperuntukkan membangun Desa Ponggok sebagai desa wisata, yaitu dengan memperbaiki dan menjaga lingkungan sekitar, serta melengkapi fasilitas penunjang wisata, sehingga dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun manca, untuk datang ke desa Ponggok dan menikmati setiap alam, makanan olahan serta fasilitas lainnya.

Bentuk kegiatan lain yang diselenggarakan dengan memanfaatkan dana desa di antaranya program pelayanan tempat tinggal masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut.

“Kemandirian juga sudah, program rumah, 1 rumah 1 mck. Keadilan ini berkat dengan pendanaan desa tahun 2015-2019, nah ketimpangan kesenjangan sosial ini, kita tutup, ini kemiskinan, gini ya ponggok dah maju, dukuh 1 itu masih tertinggal, nah dana desa kita pupuk disana untuk tata ruang dan lingkungan dimana kami membuat rehab rumah, penanganan pemukiman, ramah anak, ramah lingkungan, termasuk juga kami membuat tempat destinasi wisata untuk dikembangkan agar menggerakkan ekonomi di sana.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan sehat, pemerintah desa menyelenggarakan program rumah, yaitu satu rumah satu MCK. Program ini diselenggarakan karena masih ada masyarakat yang belum memiliki MCK yang layak di rumahnya. MCK yang disediakan digunakan oleh beberapa keluarga yang berada di sekitarnya. Oleh karena pemerintah ingin menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat, sehingga masyarakatnya juga dapat terdampak sehat, maka dengan program satu rumah satu MCK ini sebagai salah satu kebijakan yang ditetapkan. Adanya keterbatasan dana desa, maka program ini hanya diberikan kepada beberapa rumah setiap tahunnya dan akan terus dilakukan hingga seluruh rumah memiliki minimal satu MCK.

Selain program tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana desa yang diperoleh untuk memperbaiki lingkungan dan melakukan perbaikan beberapa rumah masyarakat desa. Rumah yang diperbaiki merupakan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan dan terlihat kurang layak ditempati. Pemerintah juga menggunakan dana desa untuk membuat lingkungan yang ramah anak serta membuat desa menjadi layak sebagai destinasi desa wisata. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian

di desa, serta dapat memproduktifkan masyarakat desa untuk menghasilkan pendapatan.

Informan MSD menambahkan, bahwa kegiatan lain yang diselenggarakan pemerintah desa adalah berupa pelatihan. Pelatihan ini ditujukan untuk menciptakan UKM desa. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Informan KDP berikut.

“Lebih ke pemberdayaan dan lingkungan. Kami ada pelatihan, workshop, ada bantuan modal, bantuan alat. Pelatihan pengemasan UMKM. Pasti, pemberdayaan ada UKM dibawah PKK. Mereka melakukan kegiatan masing-masing kelompok itu. Ketika mereka membuat produk itu disetorkan ke PKK untuk brandingnya. Jadi kurang lebih 120 juta perbulan yang didapat.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Pemerintah melakukan kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan, workshop, bantuan modal dan bantuan alat. Pelatihan dan workshop diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat tertarik untuk menciptakan sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya dari desa tersebut, serta memiliki keterampilan yang baik dalam membuat suatu olahan makanan atau karya seni yang dapat dijual kepada wisatawan. Pelatihan dan workshop ini tentunya dinaungi oleh UKM di bawah PKK yang ada di desa, dan dapat diikuti oleh setiap masyarakat yang ingin menambah keterampilan dan menambah pendapatan. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah desa juga memberikan bantuan modal agar usaha atau UKM yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, agar produk yang dihasilkan dapat beredar luas dan diterima

wisatawan, pemerintah melalui PKK memberi bantuan untuk membuat brand produk yang dapat diterima masyarakat luas.

Informan KRW menambahkan, bahwa pemerintah juga turut melakukan pembangunan di tiap RT maupun RW. Berikut kutipan wawancaranya.

“Jadi apa perlu yang di *cover* selama 4 tahun terakhir. Pembangunan RT, RW dari musrenk jadi tiap pembangunan fisik. Tempat saya ini yang terakhir mengadakan waduk galo, ini yang 2019 belum teralisasi mungkin akhir tahun. Lewat UKM ada tiap RW ada PKK/pelatihan tugas ibu ibu didatangkan narasumber. Ada pelatihan UKM.” (Hasil wawancara dengan informan KRW – Desa Ponggok)

Pemerintah menggunakan dana desa untuk melakukan pembangunan yang bertujuan memperbaiki lingkungan RT maupun RW yang ada di tiap desa. Salah satu program yang diusung pemerintah adalah membangun Waduk Galo. Pembangunan waduk ini ditujukan untuk menampung air yang dapat digunakan masyarakat sekitar, baik untuk mengairi sawah atau sebagai persediaan air untuk musim kemarau. Namun demikian, karena keterbatasan dana dan banyaknya program yang harus dijalankan, pembangunan waduk ini belum sempat dilaksanakan.

Pada Desa Kalangan, bentuk kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa berupa pengembangan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia. Berikut kutipan wawancaranya.

“Pengembangan fisik, pemberdayaan seperti pelatihan karataruna, pembuatan bibit ibu PKK.” (Hasil wawancara dengan informan MSN – Desa Kalangan)

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah berupaya menyelenggarakan kegiatan penggunaan dana desa dengan

melakukan pengembangan fisik, yaitu perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Hal demikian dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Desa Kalangan. Selain itu, pemerintah desa juga menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melakukan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan terhadap karangtaruna dan juga ibu-ibu. Hal demikian dilakukan untuk meningkatkan keterampilan karangtaruna dalam berbagai hal sehingga dapat lebih produktif dalam mengolah hasil sumber daya yang ada di desa serta dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Pelatihan pada ibu-ibu dilakukan dengan pelatihan pembuatan bibit tanaman yang nantinya dapat dijual kepada petani untuk disemai.

Informan MSK menambahkan, kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa menggunakan dana desa, yaitu pelatihan menjahit dan pengelolaan sampah. Pelatihan menjahit dinilai sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena lebih mudah untuk diikuti, khususnya ibu-ibu. Kegiatan pengelolaan sampah juga dinilai tepat, karena selain untuk mengolahnya menjadi produk yang dapat dijual, dapat juga untuk menjaga kebersihan desa.

Selain itu, Informan MSE menambahkan bahwa kegiatan penggunaan dana desa pada Desa Kalangan juga berupa pelatihan MC dan pembawa acara. Pelatihan tersebut diberikan karena MC maupun pembawa acara pasti dibutuhkan untuk acara apapun, sehingga profesi sebagai MC dinilai

memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dana desa juga dialokasikan untuk pelatihan menjadi MC.

Pada Desa Tegalrejo, Informan MST menyebutkan bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan kondisi fisik desa, seperti pembenahan jalan dan reboisasi. Pembenahan jalan dilakukan dengan kegiatan paving, tujuannya agar akses menuju desa lebih mudah, aman dan nyaman. Kegiatan reboisasi dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan desa agar tetap dapat terjaga dan nyaman untuk ditinggali.

BPD Desa Tegalrejo menjelaskan bahwa kegiatan penggunaan dana desa berupa perbaikan infrastruktur desa, pelatihan dan pemberdayaan lansia. Perbaikan infrastruktur dilakukan dengan memperbaiki jalan desa dan lingkungan desa, sehingga masyarakat desa maupun luar desa dapat dengan nyaman melintas atau berkunjung ke Desa Tegalrejo. Pelatihan yang diberikan berupa pembibitan ikan lele, menjatih, membuat kripik pare, pembinaan olahraga dan hadroh. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik dengan memiliki keterampilan untuk menyediakan bibit lele yang kemudian dapat menjadi bekal untuk membuat tambak lele, atau menjualnya kepada pembudidaya lele. Selain itu, adanya pelatihan menjahit dan membuat kripik sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat jika kurang berminat untuk membudidayakan lele.



#### 4.1.4 Sosialisasi Kegiatan

Setiap kegiatan yang diadakan pemerintah harus disosialisasikan agar masyarakat desa dapat turut serta dalam kegiatan tersebut serta agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi ini juga dilakukan oleh pemerintah desa sebelum penyelenggaraan setiap kegiatan. Informan MSD menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan setiap ada program baru yaitu melalui rapat. Rapat ini diselenggarakan secara rutin untuk membahas pembangunan desa melalui program-program yang dicanangkan pemerintah desa.

Hal demikian diperkuat dengan ungkapan dari Informan KDP sebagai berikut.

“Kita selalu adakan sosialisasi terhadap masyarakat, kita mencoba mengubah *mind set* atau pola pikir masyarakat, literasi dan sosialisasi dalam bentuk pelatihan.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Pongkok)

Sosialisasi yang dilakukan Kepala Desa dalam bentuk pelatihan. Dalam pelatihan ini, Kepala Desa berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, khususnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya. Hal demikian dikarenakan selama ini, masyarakat kurang termotivasi untuk mencoba menghasilkan produk dari sumber daya sekitar dalam meningkatkan perekonomiannya.

Informan KRW menambahkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan suatu program, pemerintah daerah harus musyawarah terlebih dahulu kepada RT, RW maupun perangkat desa lainnya. Berikut kutipan wawancaranya.

“Tinggal porsi masing-masing jadi kalo mau ada acara harus di musyawarahkan ke RT, RW, BPD, tokoh masyarakat diundang ke balai desa la ini yang memberi arahan perwakilan RT/RW biasanya selaku dorongan pemerintahan desa tangan kanan jadi apapun program acara pasti terealisasi.” (Hasil wawancara dengan informan KRW – Desa Ponggok)

Ungkapan tersebut menjelaskan prosedur dalam merancang kegiatan desa yang dilakukan pemerintah desa melalui rapat rutin. Rapat tersebut tentunya ditujukan untuk memusyawarahkan setiap program yang direncanakan pemerintah desa untuk pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan desa. Rapat tersebut harus diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dalam program, seperti ketua RT, ketua RW serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan adanya musyawarah ini, akan diperoleh program-program yang tepat dan bermanfaat bagi warganya, serta dapat terealisasi dengan baik.

Sosialisasi juga dilakukan oleh pemerintah desa Kalangan. Menurut informasi yang diperoleh dari Informan MSN maupun Informan MSK, sosialisasi kegiatan pemerintah desa terkait penggunaan dana desa dilakukan melalui perkumpulan di balai desa. Perkumpulan tersebut dilakukan oleh perangkat RT/RW dengan mengundang masyarakatnya untuk berkumpul dan membahas terkait pengembangan desa melalui program pemerintah desa.

Desa Tegaljrejo juga melakukan sosialisasi terhadap setiap kegiatan yang hendak diselenggarakan oleh pemerintah desa. Informan MST menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan BPD dengan menyebarkan undangan ke perangkat RT dan RW untuk berkumpul di suatu tempat, dan mensosialisasikan kegiatan pemerintah desa. Kemudian, RT dan

RW juga mensosialisasikan kepada masyarakatnya sehingga kegiatan dapat dimusyawarakkan pelenyelenggaraannya. Informan KDTR juga menyebutkan bahwa sosialisasi dilakukan melalui rapat RT maupun RW. Hal demikian didukung dengan pernyataan Informan BPD Desa Tegalrejo, bahwa sosialisasi dilakukan dengan mengundang perangkat RT, RW maupun tokoh masyarakat lain untuk mendiskusikan kegiatan pemerintah desa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

#### **4.1.5 Sasaran Kegiatan**

Setiap program yang direncanakan pemerintah desa tentunya didasarkan pada data di lapangan, yaitu terkait kebutuhan desa, kondisi desa serta kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Informan MSD menjelaskan bahwa sasaran yang dituju dari tiap program pemerintah desa adalah masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu. Hal demikian dikarenakan tidak sedikit masyarakat desa usia produktif namun belum memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, ibu-ibu yang merasa bosan jika harus di rumah, terutama ketika pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya hingga berangkat sekolah telah selesai. Waktu luang yang dimiliki dan untuk mengusir kebosanan tersebut, dapat dilakukan dengan mengikuti program yang diselenggarakan pemerintah desa.

Hal demikian diperkuat dengan pernyataan informan KRW sebagai berikut.

“Kalo ukm ada yaitu ibu-ibu. Kalo karangtaruna ada yaitu untuk olahraga salah satunya. Ibu-ibu banyak yang longgar boleh ikutan. Kuotanya

sekitar 20 orang per RW ada UKM.” (Hasil wawancara dengan informan KRW – Desa Ponggok)

Masyarakat yang menjadi target atau sasaran dalam program yang direncanakan pemerintah yaitu ibu-ibu dan karangtaruna. Ibu-ibu dalam hal ini ditempatkan dalam UKM, karena ibu-ibu memiliki waktu luang setelah ibu-ibu mengurus keluarganya di pagi hari. Namun, karena UKM yang ada di desa tidak sebanding dengan jumlah ibu-ibu yang ada di desa, maka jumlah ibu-ibu yang dapat mengikuti kegiatan UKM dibatasi sebanyak 20 orang perRW. Masyarakat umum juga dapat mengikuti kegiatan di UKM, termasuk karangtaruna. Namun, karangtaruna juga diberdayakan untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat, seperti olahraga bersama.

Informan MSN juga menyebutkan bahwa sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Kalangan adalah masyarakat. Hal demikian dikarenakan masih banyaknya masyarakat desa yang belum memiliki keterampilan untuk mengelola sumber daya desanya, serta untuk dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya. Banyak masyarakat yang turut serta dalam kegiatan pemerintah desa menggunakan dana desa. Masyarakat bergotong royong demi terselenggarakannya kegiatan pemerintah desa tersebut dengan baik.

Selain masyarakat desa, menurut Informan MSE, kegiatan dengan penggunaan dana desa dapat diikuti oleh pedagang. Pedagang yang dimaksud adalah pedagang yang juga merupakan masyarakat desa. Hal demikian dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam mengolah sumber daya yang ada di

sekitar menjadi produk olahan yang dapat dinikmati dan dibutuhkan oleh masyarakat desa maupun masyarakat secara luas.

Kegiatan penggunaan dana desa di Desa Tegalrejo menurut Informan MST ditujukan untuk karangtaruna. Hal tersebut dikarenakan karangtaruna dinilai masih dalam umur yang produktif dan mudah untuk menerima kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Selain itu, juga ditujukan agar para karangtaruna Desa Tegalrejo dapat memiliki keterampilan untuk mengolah sumber daya yang ada di desa agar lebih bermanfaat lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **4.1.6 Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan**

Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, tentunya melibatkan berbagai pihak. Informan KDP menyebutkan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan melibatkan berbagai pihak, seperti POKDARWIS, yaitu lembaga di tingkat masyarakat beranggotakan pelaku kepariwisataan dengan kepedulian dan tanggung jawab serta mendukung perkembangan pariwisata di desa. Keterlibatan tersebut diperlukan untuk mendukung terciptanya desa wisata yang diimpikan dan diharapkan dapat terwujud di Desa Ponggok, serta dapat membantu meningkatkan perekonomian desa.

Lebih lanjut, Informan KDP menyebutkan bahwa selain POKDARWIS, pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemerintah desa ini adalah seluruh lembaga dan masyarakat sekitar. Hal demikian dikarenakan pihak-pihak tersebut yang paling mengetahui kondisi dan karakteristik desa, sehingga bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki terlebih dahulu dapat

diketahui dan segera diambil tindakan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar juga sebagai wujud pemberdayaan, sehingga jika desa sudah dapat berjalan pemabangunannya atau meningkat kesejahteraannya, meskipun pemerintah tidak lagi rutin melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung, masyarakat tetap dapat berjalan sendiri dalam memajukan desa dan perekonomiannya.

Informan MSK menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan penggunaan dana desa di Desa Kalangan adalah TPK dan BPD. BPD merupakan Badan Permusyawaratan Desa. Badan tersebut merupakan perwujudan lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tentunya aspirasi yang positif dan diperlukan desa serta masyarakatnya. TPK merupakan Tim Pengelola Kegiatan. TPK tersebut sebagai tindak lanjut dari terserapnya aspirasi masyarakat desa. TPK menjadi tim pelaksana setiap kegiatan desa yang telah disepakati, dan ditetapkan oleh kepala desa yang melibatkan pemerintah desa dan juga lembaga kemasyarakatan desa.

Pada Desa Tegalrejo, pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penggunaan dana desa adalah BPD. BPD bertugas menghimpun aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang dibutuhkan untuk menyejahterakan desa dan masyarakatnya untuk kemudian ditindaklanjuti dan diawasi penyelenggaraannya.

#### **4.1.7 Dampak pada Kesejahteraan Masyarakat**

Selain berdampak pada jumlah pengangguran, pengalokasian dana desa oleh pemerintah desa juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan MSD, diketahui bahwa pemanfaatan dana desa dengan mengadakan berbagai program untuk masyarakat desa. Informan MSD menjelaskan bahwa melalui kegiatan tersebut pemerintah desa telah mampu membuat program-program yang baik, tetap sasaran dan tepat tujuan melalui pemanfaatan dana desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Hal serupa disampaikan oleh Informan KRW bahwa program pemerintah desa melalui UKM dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sekitar untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan bernilai. Selain itu, kegiatan UKM juga membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya.

Informan KDP juga menyatakan hal serupa bahwa hasil yang diperoleh dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan dari pemerintah desa cukup dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat secara maksimal dalam mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN, kebutuhan dasar pada masyarakat Desa Ponggok dengan adanya program penggunaan dana desa sudah dapat terpenuhi. Masyarakat Desa Ponggok dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan makan keluarga minimal dua kali sehari,

memiliki pakaian layak pakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tempat tinggal layak huni, dan mampu memeriksa kesehatan anggota keluarga minimal ke puskesmas setempat. Selain itu, Masyarakat Desa Ponggok juga mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya dengan membeli daging, ikan maupun telur dalam seminggu untuk dikonsumsi bersama sebagai pemenuhan gizi seimbang. Hal demikian dikarenakan masyarakat Desa Ponggok juga membudidayakan ikan nila, sehingga dapat membeli dan mengonsumsi ikan dengan frekuensi lebih sering. Masyarakat usia produktif juga sudah mampu membaca dan menulis, dan setiap rumah tangga memiliki anggota yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Kebutuhan pengembangan dan aktualisasi diri juga sudah terpenuhi bagi masyarakat Desa Ponggok, yang dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan masyarakat dan aktif mengikuti kepengurusannya, memberikan sumbangan secara sukarela, dan memperoleh informasi untuk memperbaharui pengetahuan melalui media massa maupun media internet.

Berbeda hal dengan yang disampaikan oleh Informan MSN. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan menggunakan dana desa dinilai belum dapat meningkatkan penghasilan serta belum dapat mencukupi kebutuhan kesehariannya. Namun, kegiatan pemerintah desa tersebut dinilai hanya memajukan desa saja. Hal demikian menunjukkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa Kalangan belum efektif untuk meningkatkan perekonomian dan



kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh. Hal serupa disampaikan oleh Informan MSE bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Kalangan belum dapat meningkatkan penghasilan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya.

Berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN, kebutuhan dasar pada sebagian masyarakat Desa Kalangan dengan adanya program penggunaan dana desa tidak terlalu berdampak signifikan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan ada atau tidak adanya dana desa tersebut. Kebutuhan dasar yang terpenuhi di antaranya kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang masih layak pakai, dengan kondisi tempat tinggal beberapa masyarakat masih beralaskan tanah dengan dinding semi permanen, dengan luas yang tidak terlalu besar. Sebagian masyarakat juga dapat mengonsumsi daging, ikan maupun telur, meskipun tidak rutin seminggu sekali.

Kegiatan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Tegalrejo menurut Informan MST dinilai belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat belum dapat merasakan peningkatan pada penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Informan BPD Desa Tegalrejo, bahwa perekonomian masyarakat desa sudah mengalami peningkatan. Hal demikian menunjukkan bahwa kegiatan penggunaan dana desa di Desa Tegalrejo dinilai belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tegalrejo secara menyeluruh.

Berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN, kebutuhan dasar pada sebagian masyarakat Desa Tegalrejo setelah adanya program dana desa, belum terpenuhi seluruhnya, seperti tempat tinggal dengan atap, dinding dan lantai yang baik. Kebutuhan psikologis juga tidak dapat diperoleh secara optimal, seperti pemenuhan gizi dengan mengonsumsi daging, ikan maupun telur. Masyarakat juga kurang aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa, sehingga hasil yang diperoleh juga kurang optimal. Hal demikian dikarenakan kegiatan yang diselenggarakan tidak berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, sehingga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat menjadi kurang optimal.

#### **4.1.8 Dampak pada Jumlah Pengangguran**

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah ditujukan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa. Pengangguran yang dimaksud adalah masyarakat desa dengan usia produktif namun belum memiliki pekerjaan tetap. Dulu jumlah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur, ada banyak. Namun, setelah adanya bantuan dana desa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penuturan Informan MSD, jumlah pengangguran di Desa Ponggok sudah mengalami penurunan setelah diadakannya kegiatan dari

pemerintah desa. Hal tersebut didukung oleh pernyataan KDP bahwa pengangguran di Desa Pongkok dimungkinkan sudah habis, dikarenakan keseluruhannya sudah mengikuti program pemerintah desa, khususnya yang melalui UKM.

Hal serupa juga disampaikan oleh Informan KRW bahwa jumlah pengangguran hampir habis. Berkurangnya jumlah pengangguran ini juga disebabkan karena adanya kegiatan pemerintah daerah yang memberdayakan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan desa. Selain itu, dengan adanya pabrik air minum mineral dalam kemasan yang mengambil sumber daya desa, juga memberdayakan masyarakat sekitar dalam proses produksinya. Namun, tidak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dengan dagangan utama adalah menjual berbagai sumber daya alam yang dibudidayakan, seperti ikan dan hasil pertanian lainnya.

Hal berbeda disampaikan oleh Informan MSN dari Desa Kalangan. Menurut informan, dengan adanya kegiatan pemerintah desa tersebut, masyarakat Desa Kalangan belum memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi keluarganya. Namun menurut Informan MSK, jumlah pengangguran di Desa Kalangan mengalami penurunan dengan adanya kegiatan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Informan MSE, bahwa kegiatan penggunaan dana desa yang diselenggarakan dapat mengurangi jumlah pengangguran melalui pelatihan pembibitan tanaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang

diselenggarakan pemerintah desa menggunakan dana desa dinilai belum efektif menciptakan lapangan kerja baru yang mencakup seluruh masyarakat desa untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Jumlah pengangguran di Desa Tegalrejo menurut Informan MST tidak mengalami perubahan. Menurutnya dengan adanya kegiatan penggunaan dana desa belum dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa. Namun, kegiatan tersebut cenderung memberdayakan karangtaruna untuk lebih aktif mengelola desa dengan lebih baik.

Sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh Informan BPD, bahwa menurutnya jarang ada pengangguran di Desa Tegalrejo, karena desa tersebut merupakan wilayah industri. Oleh karena itu, menurutnya pengangguran di Desa Tegalrejo tidaklah banyak. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Informan KDTR bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dapat mengurangi jumlah pengangguran.

#### **4.1.9 Pengawasan yang Dilakukan**

Setiap pelaksanaan kegiatan tentunya diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diselenggarakan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan setiap program dapat diselenggarakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Informan KDP menjelaskan bahwa monitoring dilakukan secara rutin. Hal tersebut disampaikan sesuai dengan kutipan wawancara berikut.

“Kita ada monitoring, *meeting* di setiap sabtu untuk mengetahui progressnya gimana. *Meeting* dengan PKK dan pemerintah desa. Ketika kita *check* ke lapangan untuk para pekerjaan itu dah sesuai RAB apa belum.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Pongkok)

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa monitoring dilakukan dalam kegiatan rapat (*meeting*) yang diadakan setiap hari sabtu. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas progress dari setiap kegiatan yang dirancang pemerintah desa dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Kegiatan rapat tersebut dilakukan pemerintah desa dengan PKK. Pengawasan juga dilakukan secara langsung dengan mengecek pekerja di lapangan, dan mengecek kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan RAB.

Selain itu, Informan KRW menambahkan bahwa birokrasi di Pemerintah Desa Pongkok sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa birokrasi yang dilalui sudah sesuai, mulai dari RT, RW hingga desa. Masyarakat mengajukan ide program dilakukan dengan mengajukan proposal kepada perangkat RT, kemudian jika disetujui secara musyawarah, selanjutnya diajukan kepada RW. Setelah dari tingkat RW disetujui, selanjutnya pengajuan disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti, dengan pemberian persetujuan, baik dengan bantuan materiil maupun bantuan tenaga.

Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa selama tahun 2015-2018 sudah terlaksana 100%. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan BPD. Keterlaksanaan seluruh kegiatan tersebut tidak ada komplain dan sudah sesuai dengan anggaran desa dan tepat sasaran kegiatan. Berikut kutipan wawancaranya.

“100% terlaksana, buktinya tidak ada komplain, dalam anggaran desa sudah tepat sasaran. BPD melakukan *crosscheck* antara dana awal dan implementasi yang dilakukan jika ada penyimpangan, BPD memberikan arahan agar sesuai dengan anggaran yang ada.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Ponggok)

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa BPD melakukan pengawasan dengan mengecek keluar masuknya dana yang digunakan. Pengecekan ini dilakukan dengan membandingkan dana desa awal yang diperoleh, dengan yang direncanakan, serta dengan hasil implementasi kegiatan. Pengawasan juga dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada implementor agar menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan anggaran yang ada.

Pada Desa Kalangan, pengawasan juga dilakukan oleh BPD. Namun, Informan BPD Desa Kalangan menjelaskan bahwa terdapat tim tersendiri yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, sehingga pihak BPD secara langsung tidak melakukan pengawasan langsung pada setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Pada Desa Tegalrejo, Informan BPD menyampaikan bahwa kegiatan penggunaan dana desa diawasi langsung oleh BPD. Hal demikian dikarenakan BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga mengawasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Selain pengawasan, BPD juga membuat pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang diselenggarakan kepada Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Pusat.

#### **4.1.10 Hambatan yang Dialami**

Setiap program yang diselenggarakan pemerintah tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang dapat menghambat keterlaksanaannya. Begitu pula dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Informan KDP menjelaskan bahwa hambatan yang dialami berupa sumber daya manusia yang belum merata. Berikut kutipan wawancaranya.

“SDM belum merata, masyarakat belum satu visi, konteksnya terbatas pada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Ponggok)

Sumber daya manusia sebagai penggerak utama setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Tanpa adanya sumber daya manusia yang turut serta dengan keterampilan yang dibutuhkan, maka kegiatan tersebut tidak dapat terselenggara dengan baik, dan permasalahan sumber daya manusia yang belum merata di setiap desa ini menjadi permasalahan pemerintah desa dalam mengimplementasikan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakannya. Akibat dari kurangnya terpenuhinya sumber daya manusia yang bertugas untuk mengimplementasikan kegiatan serta melakukan pengawasan, menyebabkan masyarakat desa belum terdampak secara optimal dari adanya kegiatan tersebut, sehingga masyarakat desa belum berada pada satu visi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kurang tercapainya target yang diharapkan pemerintah desa dengan diselenggarakannya kegiatan mensejahterakan desa.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Informan BPD, bahwa dalam implementasi dan pengawasan kegiatan mengalami hambatan. Berikut kutipan wawancaranya.

“Ada kerjaan lain, belum tentu pejabat fokus pada kerjaan. Jadi ada aktivitasnya banyak di luar jam kerja. Selain itu seringkali kurang komunikasi.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Ponggok)

Hambatan yang dialami yaitu adanya pekerjaan lain yang juga perlu diselesaikan. Adanya pekerjaan lain ini membuat BPD menjadi sering beraktivitas di luar jam kerja dalam pengawasan, sehingga menjadi kurang fokus pada pengawasan kegiatan penggunaan dana desa. Selain itu, kurangnya komunikasi membuat pengawasan menjadi berkurang.

“Caranya adalah meningkatkan komunikasi dan konsolidasi, jika sudah ada kesepakatan maka kegiatan tersebut harus dilaksanakan sehingga tidak ada kesalahpahaman.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Ponggok)

Berdasarkan hambatan tersebut Informan BPD mencoba melakukan beberapa langkah untuk mengatasinya, salah satunya dengan meningkatkan komunikasi. Komunikasi secara langsung yang dirasa kurang, diatasi dengan melakukan komunikasi melalui telepon. BPD juga melakukan konsolidasi melalui kesepakatan dengan implementor lain untuk berkomitmen melaksanakan kegiatan menggunakan dana desa tersebut.

Hal serupa disampaikan oleh Informan MSN. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan pemerintah desa Kalangan dirasa memiliki hambatan. Hambatan tersebut yaitu kurangnya waktu pelaksanaannya, dan hal tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan efektif.



Selain itu, Informan MSE juga menyampaikan bahwa hambatan yang dialami yaitu kurangnya kepekaan dan respon yang diberikan masyarakat kepada kegiatan yang diselenggarakan. Hal demikian diperkuat dengan ungkapan BPD Desa Kalangan, bahwa hambatan yang dialami selama proses penyelenggaraan kegiatan dana desa adalah pada komunikasi dengan desa, karena pembentukan TPK tidak melibatkan BPD.

Hambatan juga dirasakan oleh Informan MST di Desa Tegalrejo. Hambatan yang dirasakan yaitu adanya kegiatan lain yang dimiliki oleh karangtaruna. Karangtaruna menjadi sasaran utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tegalrejo, sehingga kelancaran berlangsungnya kegiatan juga berdasarkan tingkat kehadiran dari karangtaruna itu sendiri. Oleh karena itu, dengan banyaknya anggota karangtaruna yang tidak hadir atau absen dalam kegiatan maka manfaat yang seharusnya dapat diperoleh menjadi tidak optimal.

Namun demikian, hal sebaliknya disampaikan oleh Informan MSD dan Informan MSK, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa di Desa Kalangan tidak ditemukan hambatan. Informan KDTR menyampaikan hal serupa, bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan dana desa di Desa Tegalrejo tidak mengalami hambatan berarti. Hal demikian dapat dikarenakan masyarakat tidak secara langsung dalam menyiapkan keterlaksanaan kegiatan. Masyarakat hanya turut serta dalam program tersebut dan mengikutinya, dan memperoleh pengetahuan serta manfaatnya.

#### **4.1.11 Respon terkait Kegiatan**

Dengan adanya kegiatan tersebut tentunya dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam pemberian lapangan kerja hingga peningkatan perekonomian masyarakat. Informan MSD menyatakan sanga setuju dengan adanya kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal demikian dikarenakan dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat menjadi memiliki tambahan pendapatan yang dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Ungkapan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Informan KDP, bahwa kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat desa. Berikut kutipan wawancaranya.

“Dana desa berkah bagi desa, kesempatan bagi desa-desa seluruh Indonesia. Memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Ya alhamdulillah, masyarakat terselamatkan dengan adanya dana pembangunan desa, UMK, Pokdawis, wisata.” (Hasil wawancara dengan informan KDP – Desa Pongkok)

Bagi Kepala Desa, dana desa dari pemerintah pusat merupakan suatu berkah, karena dana tersebut memberikan kesempatan bagi desa-desa di seluruh Indonesia, untuk dapat mengelola sendiri untuk kepentingan desa, khususnya untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa.

Selain itu, Informan BPD Desa Pongkok juga memberikan respon terhadap kegiatan penggunaan dana desa. Berikut kutipan wawancaranya.

“Gimana desa ini membuat swa sistem baik itu hak dan kewajiban desa. Sesuai dengan sasaran dan anggaran sehingga dapat mendorong kegiatan

desa, dimana berdasar aspirasi masyarakat yang sesuai dengan regulasi yang mengikatnya seperti permedargi 110, permendiknas 2015, peraturan daerah, pemerintahan desa.” (Hasil wawancara dengan informan BPD – Desa Ponggok)

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Informan BPD berharap bahwa dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat membuat desa tersebut menjadi lebih mandiri dengan membuat swa sistem. Swa sistem tersebut dibuat juga didasarkan pada anggaran dan sasaran, serta aspirasi masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Informan MSN, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah desa Kalangan dinilai perlu dilakukan. Kegiatan tersebut dirasakan dapat memajukan desa Kalangan, sehingga pemerintah desa perlu mengalokasikan dana desa yang diperoleh untuk pengembangan dan perbaikan tiap RW, yang pada akhirnya juga dapat memajukan Desa Kalangan. Informan MSE menambahkan bahwa kegiatan penggunaan dana desa ini perlu dilakukan pemerataan kepada seluruh masyarakat desa, sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan secara merata. Selain itu, menurut Informan BPD Desa Kalangan, seluruh kegiatan penggunaan dana desa selama periode 2015-2018 sudah terlaksana semua dengan baik.

Pada Desa Tegalrejo, Informan MST menyampaikan bahwa masyarakat merespon baik kegiatan penggunaan dana desa untuk perbaikan Desa Tegalrejo. Hal demikian dikarenakan dari kegiatan tersebut, drainase yang diperbaiki menjadi lebih lancar, efektif dan efisien. Selain itu, Informan MST juga mengapresiasi pihak desa karena telah menambah

wawasan banyak masyarakat yang diuntungkan. Masyarakat merasa diperhatikan dengan adanya dana desa yang diberikan dalam bentuk berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena, kegiatan penggunaan dana desa dirasa bermanfaat bagi masyarakat, maka Informan MST mendukung keberlaksanaan kegiatan tersebut secara rutin dan harus ditingkatkan lagi agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaatnya.

Menurut BPD Desa Tegalrejo, kegiatan penggunaan dana desa sudah diselesaikan hingga ke tahap tiga. Kegiatan yang sudah terlaksana yaitu terkait pemberdayaan fisik maupun tidak. Pemberdayaan fisik terkait dengan perbaikan infranstruktur desa, sedangkan pemberdayaan non fisik yaitu pemberdayaan masyarakat dengan menyertakan masyarakat sekitar untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan. Berdasarkan kegiatan yang diselenggarakan tersebut, Informan BPD Desa Tegalrejo menilai sudah ada peningkatan pada masyarakat.

#### 4.2 Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan temuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Temuan Penelitian

<b>Aspek yang Diamati</b>	<b>Desa Ponggok</b>	<b>Desa Kalangan</b>	<b>Desa Tegalrejo</b>
Prioritas pengalokasian dana desa	a. Mengadakan sarana prasarana pendukung Wisata Besuki b. Meningkatkan varian produk c. Mengembangkan	a. Pembangunan fisik desa, seperti perbaikan infrastruktur desa b. Pemberdayaa	a. Pembangunan fisik jalan b. Pembangunan infrastruktur desa lainnya

<b>Aspek yang Diamati</b>	<b>Desa Pongkok</b>	<b>Desa Kalangan</b>	<b>Desa Tegalrejo</b>
	<p>potensi desa</p> <p>d. Membangun Waduk Galo</p> <p>e. Mensejahterakan desa</p>	<p>n masyarakat desa, seperti meningkatkan produktivitas masyarakat desa</p>	
Bentuk kegiatan	<p>a. Pengadaan bantuan peralatan untuk pengembangan usaha desa</p> <p>b. Pelatihan UKM</p> <p>c. Program satu rumah satu MCK</p> <p>d. Memperbaiki rumah kurang layak tinggal</p> <p>e. Memperbaiki tempat destinasi wisata</p> <p>f. Memberdayakan masyarakat dan lingkungan</p>	<p>a. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa</p> <p>b. Pelatihan menjahit</p> <p>c. Pelatihan pengelolaan sampah</p> <p>d. Pelatihan MC atau pembawa acara</p>	<p>a. Pembenahan jalan</p> <p>b. Perbaikan infrastruktur desa</p> <p>c. Perbaikan lingkungan desa</p> <p>d. Reboisasi</p> <p>e. Pelatihan pembibitan lele, menjahit, membuat kripik pare</p> <p>f. Pembinaan olahraga dan hadroh</p>
Sosialisasi yang dilakukan	<p>a. Melalui rapat</p> <p>b. Musyawarah perangkat RT, RW, BPD</p>	<p>a. Perkumpulan desa</p>	<p>a. Menyebarkan undangan untuk perkumpulan perangkat RT-RW, masyarakat, Pemerintah dan Lembaga Desa</p>
Sasaran kegiatan	<p>a. Ibu-ibu</p> <p>b. Karangtaruna</p> <p>c. Masyarakat umum</p>	<p>a. Masyarakat desa</p> <p>b. Pedagang</p>	<p>a. Masyarakat umum</p> <p>b. Karangtaruna</p>
Pihak yang terlibat penyelenggaraan	<p>a. Kepala Desa</p> <p>b. BPD</p> <p>c. PKK</p> <p>d. UKM</p> <p>e. POKDARWIS</p> <p>f. Perangkat RT dan Perangkat RW</p>	<p>a. TKP</p> <p>b. BPD</p>	<p>a. BPD</p>

<b>Aspek yang Diamati</b>	<b>Desa Ponggok</b>	<b>Desa Kalangan</b>	<b>Desa Tegalrejo</b>
Dampak pada pengangguran	Efektif mengurangi jumlah pengangguran menjadi berkurang	Kegiatan dinilai belum efektif menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi jumlah pengangguran	Kegiatan cenderung memberdayakan karangtaruna, belum efektif mengurangi jumlah pengangguran
Dampak pada perekonomian	Perekonomian masyarakat setempat menjadi meningkat	Belum efektif meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh	Belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tegalrejo secara menyeluruh
Pengawasan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat tiap hari sabtu</li> <li>b. <i>Crosscheck</i> langsung di lapangan</li> <li>c. <i>Crosscheck</i> kesesuaian pekerjaan dengan RAB</li> </ul>	BPD tidak melakukan pengawasan secara langsung di lapangan	Pengawasan dan pelaporan langsung dilakukan oleh BPD
Hambatan yang dialami	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengimplementasikan kegiatan penggunaan dana desa</li> <li>b. Adanya pekerjaan lain yang harus diselesaikan selain pengawasan oleh BPD, sehingga fokus terganggu</li> <li>c. Kurangnya komunikasi antara BPD, pemerintah desa dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya waktu pelaksanaan</li> <li>b. Kurangnya kepekaan dan respon masyarakat</li> </ul>	Keikutsertaan yang kurang optimal sehingga manfaat yang dirasakan juga kurang optimal